

NASKAH PUBLIKASI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MASYARAKAT KAMPUNG ADAT NAGA DALAM PILKADA
SERENTAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA PADA
TAHUN 2015**

Milawati Nengsih

Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: Milawati.nengsih.2013@fisipol.umy.ac.id

NASKAH PUBLIKASI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT ADAT KAMPUNG
NAGA DALAM PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA PADA
TAHUN 2015

Disusun Oleh:

Milawati Nengsih

20130520231

Telah disetujui dan disahkan pada:

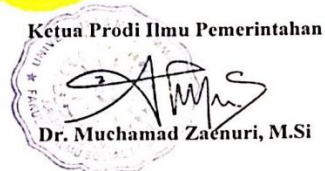
Hari/Tanggal : Jum'at, 2 Maret 2018
Tempat : Ruang Sidang Fisipol
Pukul : 08.00 WIB

Dosen Pembimbing



Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si

Mengetahui,



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MASYARAKAT KAMPUNG ADAT NAGA DALAM PILKADA
SERENTAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA PADA
TAHUN 2015**

Milawati Nengsih

Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: Milawati.nengsih.2013@fisipol.umy.ac.id

SINOPSIS

Indonesia telah mengalami banyak pasang surut dalam sistem pemerintahannya dan Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu dari daerah yang mengikuti pilkada serentak untuk pertama kalinya. Antusiasme warga Kabupaten Tasikmalaya kurang dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya, dan mendapatkan hasil presentase partisipasi 60,33%. Kendati seperti itu Kampung Adat Naga yang jauh dari pengaruh kota dan masih terisolir dan akses terhadap informasi relatif terbatas justru mempunyai presentase partisipasi lebih unggul dari pada partisipasi Kabupaten Tasikmalaya yakni 77%.

Dalam pemerintahannya masyarakat Kampung Adat Naga di pimpin oleh seorang kuncen yang dimana jabatan seorang kuncen turun menurun layaknya sistem kerajaan yang berhak menjabat kuncen selanjutnya haruslah dari keturunan kuncen terdahulu. Ada dua faktor yang mempengaruhi partisipasi warga Kampung Adat Naga yakni 1) Kepercayaan terhadap Pemerintah 2) Tingkat Kesadaran Masyarakatnya yang Tinggi. Sekalin kedua faktor tersebut, faktor kuncen juga mendominasi keputusan dari warga Kampung Adat Naga karena titah seorang kuncen dipatuhi dan ditaati oleh warga Kampung Adat Naga.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat Adat, Pilkada Serentak

PENDAHULUAN

Kampung Adat Naga sangat berbeda dengan kampung lain yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun berbeda, warga Kampung Adat Naga memiliki prinsip menjaga alam yaitu dengan cara hidup di alam dan bersama alam. Kampung Adat Naga menjadi salah satu daerah yang mempunyai daya tarik tersendiri dalam partisipasinya, bahkan dalam pemerintahannya sendiri Kampung Adat Naga memiliki budaya politik yang sangat unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam pemilihan Kepala Kampung, mereka tidak mengadakan voting atau pemilihan kepala daerah biasanya, tetapi mereka memilih Kepala Suku atau yang sering disebut dengan *kuncen* atas dasar keturunannya. Jabatan seorang Kepala Suku tidak bisa digantikan sampai ia meninggal dunia. (Iin, Kamis 23 Februari 2017)

Kendati seperti itu, masyarakatnya dituntut untuk ikut aktif dalam berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah seperti pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati. Kekhasan budaya adat kampung Adat Naga yang dominan dengan kearifan budaya lokalnya sangat menarik untuk dikaji, diteliti dan dikaitkan dengan kondisi politik sekarang ini. Maka dari itu penulis tertarik

untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan Kampung Adat Naga dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ADAT KAMPUNG ADAT NAGA DALAM PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA PADA TAHUN 2015”**.

KERANGKA TEORI

1. Partisipasi Politik

Menurut (Hendrik, 2010: 140) partisipasi Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat juga difahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik menurut (Hendrik, 2010, hal. 141) adalah sebagai berikut:

1. *Status sosial dan ekonomi*
2. *Situasi*
3. *Afiliasi politik orang tua*

4. *Pengalaman berorganisasi*
5. *Kesadaran politik*
6. *Kepercayaan terhadap pemerintah*
7. *Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informasi*

2. Masyarakat Adat

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dimana disana menjelaskan dalam Pasal 6 Ayat (3), menjelaskan mengenai masyarakat adat yang berisi bahwa “masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan”.

Menurut Fredrik Bart dalam (Mahkarli, 2014: 12) menjelaskan bahwa kelompok etnis terbentuk karena adanya ciri yang ditentukan oleh kelompok itu sendiri. Ciri ini disebut identitas yang sangat menentukan ada dan tidaknya suatu kelompok etnis seperti, bahasa, ciri fisik, budaya, agama. Misalnya etnis Cina dengan bahasa dan budaya dapat memperlihatkan dan membedakan mereka

dengan kelompok-kelompok etnis lain, seperti etnis Jawa, Sunda, Minang, Papua, dan sebagainya.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum pertama kali yang paling demokratis di Indonesia juga yaitu pemilihan umum pada tahun 1955 yang mana didalamnya mengikutsertakan banyak partai politik (*multiparty system*). Pemilu tahun 1955 sulit dilupakan oleh rakyat Indonesia, karena dalam penyelenggaraannya kondisi warga negara saat ini dalam keadaan memprihatinkan karena disamping adanya upaya penjajah untuk menduduki kembali Indonesia, disabilitas politik Indonesia yang rentan dengan berbagai upaya pemisahan diri dan perubahan sistem politik yang terus mengalami perubahan dari sistem presidensial kepada sistem parlementer. Meskipun seperti itu, pemilu tahun 1955 merupakan langkah maju bagi terciptanya demokrasi dalam sistem politik Negara yang baru memasuki masa kemerdekaan. (Juliansyah, 2013. *Sitem Politik Indonesia Pasca Reformasi*. Hal:122)

4. Pilkada

Saluran demokrasi langsung pada tingkat pemerintah lokal telah dibuka pada tahun 2005. Sebagai sebuah Negara yang demokratis tentunya pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1955 belum mampu mewujudkan nilai kedemokratisan yang ideal maka pemerintah dan konstitusi Indonesia secara fundamental juga sudah mengakui dan menjamin kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat (2) bahwa: *“kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tampaknya menjadi materi utama di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004, setidaknya terindikasi dari jumlah pasal yang mengaturnya, yakni mulai pasal 56 s/d Pasal 119 (sebanyak 64 Pasal). Secara substansif materi muatan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut telah mencakup seluruh muatan bahkan sanksi hokum bagi pelanggaran yang terjadi.

5. Pilkada Serentak

Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 dengan cakupan daerah, sedangkan pilkada serentak dengan cakupan nasional akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Dengan adanya Undang-Undang mengenai pilkada serentak ini diharapkan dapat menghemat anggaran serta memberikan calon pemimpin yang loyal, berintegritas, berwawasan serta bertanggung jawab terhadap amanah yang sudah diberikan masyarakat kepadanya. Undang-Undang yang ada di Indonesia dirasakan sudah cukup mampu memberikan nilai demokrasi yang sesungguhnya bagi rakyat Indonesia, ditambah lagi dengan adanya pilkada serentak masyarakat Indonesia lebih merasa dilibatkan dalam pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung 1 Tahun sekali di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara

ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Kampung Adat Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan wawancara secara mendalam dengan warga Ketua *Kuncen*, warga Kampung Adat Naga dan Pihak KPUD Kabupaten Tasikmalaya.

PEMBAHASAN

1. Status Sosial dan Ekonomi Masyarakat Adat Kampung Adat Naga

Status sosial dan ekonomi masyarakat Kampung Adat Naga tidak mempengaruhi warganya dalam berpartisipasi. Meskipun dalam pemilihan *kuncen* masih menerapkan sistem kerajaan tetapi dalam pemilihan umum kepala daerah warga disana selalu ikut andil dalam memilih serta dari faktor ekonomi meskipun berbedanya mata pencaharian warga disana tetap rukun, aman serta damai satu sama lain. Ini terbukti dari bentuk bangunan kampung Adat Naga sendiri dari zaman dahulu tidak pernah berubah dan itu melambangkan bahwa warga Kampung Adat Naga sama setara sederajat tidak dibedakan atas dasar kekayaan semata.

2. Situasi Masyarakat Adat Kampung Adat Naga

Dengan situasi masyarakat adat Kampung Adat Naga yang tidak mau menerima arus globalisasi, mereka menganggap bahwa hal ini tidak mempengaruhi mereka dalam berpartisipasi politik. Mereka tidak merasa terbebani dengan situasi Kampung Adat Naga yang seperti ini, bahkan mereka merasa bangga hidup di Kampung Adat Naga yang mempunyai prinsip "hidup dialam, bersama alam bukan malah merusak alam". Warga disana justru bersemangat pergi berbondong-bondong menaiki anak tangga ke balik TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

3. Afiliasi Politik Orang Tua

Afiliasi orang tua adalah bagaimana cara orangtua mempengaruhi anaknya untuk menggunakan hak pilihnya mencoblos apa yang mereka coblos juga. Para orang tua di masyarakat adat Kampung Adat Naga tidak serta merta mempengaruhi dan mendoktrin anaknya untuk ikut memilih apa yang mereka pilih, kebanyakan dari mereka

hanya menanyakan nama dari pasangan calon yang ikut andil dalam pemilihan serta asal dari pasangan calon tersebut, serta menanyakan alur dari proses mencoblosan sendiri.

4. Pengaruh Berorganisasi Masyarakat Adat Kampung adat Naga

Di Kampung Adat Naga sendiri terdapat organisasi Hipana (Himpunan Pramuwisata Masyarakat adat Kampung Adat Naga) serta memiliki Kopwa (Koperasi Warga) yang mana keduanya berada di kawasan parkir di Kampung Naga. Organisasi Hipana sendiri dibentuk oleh sekelompok masyarakat adat Kampung Adat Naga yang dikhususkan untuk memantau dan mengetahui berapa jumlah pengunjung tiap bulannya. Hipana sendiri bertujuan untuk memandu orang atau *tourism* mancanegara agar lebih mempermudah dalam pengenalan Kampung Adat Naga kepada para wisatawan yang kurang memahami bahasa Indonesia. Meskipun warga memiliki organisasi Hipana dan Kopwa tetapi warga Kampung Adat Naga tidak mengikuti organisasi lainnya seperti organisasi keislaman, ormas atau lainnya. Kesimpulannya

bahwa faktor pengaruh berorganisasi tidak mempengaruhi warga Kampung Adat Naga untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.

5. Kesadaran Politik Masyarakat Adat Kampung Adat Naga

Kesadaran politik warga Kampung Adat Naga harus kita acungi jempol karena faktanya disetiap kali pemilihan warga Kampung Adat Naga selalu tinggi. Masyarakat disana mengatakan bahwa memilih merupakan kewajiban mereka sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki sistem demokrasi dan sebagai warga Negara yang baik mereka harus memilih kepala daerah yang mana akan menjabat Kabupaten Tasikmalaya 5 tahun kedepan serta masa depan Kabupaten Tasikmalaya berada di tangan rakyat yang memilih. Pada kesimpulannya faktor kesadaran politik mempengaruhi warga Kampung Adat Naga dalam partisipasinya.

6. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Masyarakat Kampung Adat Naga percaya sepenuhnya dengan pemerintah, seperti yang diutarakan Pak *kuncen* sendiri bahwa “Kita harus turut tumut dengan pemerintah,

kita percaya bahwa pemerintah itu untuk kita patuhi bukan kita tentang, dan juga kita akan turut kepada pemerintah yang dijalur yang benar bukan malah sebaliknya”. Pada kesimpulannya faktor kepercayaan terhadap pemerintah mempengaruhi warga Kampung Adat Naga dalam partisipasinya.

7. Perangsang Partisipasi Melalui Sosialisasi Media

Massa dan Diskusi-diskusi Informal

Melihat kenyataan yang ada di Kampung Adat Naga yang mana notabennya jauh dari perkembangan sekarang maka sangat mustahil apabila media elektronik dan internet dapat menunjang tingkat partisipasi politik pada masyarakat Kampung Adat Naga. Bahkan media cetak seperti koran dan majalah tidak beredar di Kampung Adat Naga dan tidak dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Kampung Adat Naga.

Menurut data yang ada, masyarakat Kampung Adat Naga mengetahui informasi tentang pasangan calon hanya dari baliho yang dipajang diluaran Kampung Adat Naga, melalui perbincangan dengan orang sekitar Kampung Adat Naga serta sosialisasi dari pihak KPUD setempat.

Tidak ada diskusi-diskusi mengenai pasangan calon mana yang akan mereka pilih atau berkaitan dengan perpolitikan karena menurut pak *kuncen* selaku ketua adat warga Kampung Adat Naga tidak diperbolehkan untuk mengikuti perpolitikan dalam hal apapun. Akan tetapi apabila menjadi relawan dalam TPS itu diperbolehkan.

KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Kampung Adat Naga di dasari oleh dua faktor, yakni faktor kesadaran politik masyarakat Kampung Adat Naga dan faktor kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat Kampung Adat Naga mengetahui pasangan calon yang mencalonkan diri pada pilkada serentak tahun 2015 lalu dari baliho yang dipajang di parkiran Kampung Naga serta dari desas desus antar warga disana. Selain itu, pihak KPUD juga gencar melakukan sosialisasi dengan terjun langsung ke Kampung Adat Naga untuk mensosialisasikan pilkada serentak agar masyarakat disana tidak ketinggalan informasi mengenai segala hal tentang pilkada serentak.

Faktor yang tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Kampung Adat Naga adalah status sosial dan ekonomi, situasi, afiliasi politik orangtua, pengaruh berorganisasi serta perangsang partisipasi melalui media massa dan diskusi-diskusi informal. Keadaan geografis Kampung Adat Naga memang mengharuskan kita untuk berjalan apabila ingin mengunjungi Kampung tersebut membuat kewalahan pihak KPUD dalam perjalanannya menuju Kampung Adat Naga. Jalan yang di buat tangga tidak lintas membuat masyarakat Kampung Adat Naga melalaikan kewajiban mereka menggunakan hak pilihnya. *Event* pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan lima tahunan membuat antusias warga disana meningkat dalam penyambutannya. Masyarakat disana berbondong-bondong naik keatas parkiran menuju TPS terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, P. M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juliantara, Dadang. (2004). *Pembaharuan Kabupaten*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Mizan. (1997). *Evaluasi Pemilihan Orde Baru*. Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKAPI.
- Milles, Matthew dan Michael, A. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta. UIP.
- Moleong, Lexy, J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sjaf, S. (2014). *Politik Etnik : Dinamika Politik Lokal di Kendari*. Jakarta: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggta IKPI DKI Jakarta.
- Singarimbun, dan Sofian Effendi. (2008). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. Airlangga.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarama Indonesia.
- Sugiyono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. ALFABETA.
- Suryabrata, Sumadi, (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta. Rajawali.
- Marzuki. 2007. *“Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi*